

FILSAFAT BAHASA DALAM RETORIKA POLITIK: ANALISIS UJARAN PEJABAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP WACANA PUBLIK

Mohammad Fikri

Sekolah Tinggi IlmuSyariah Nurul Qarnain

email: rindumaulid@gmail.com

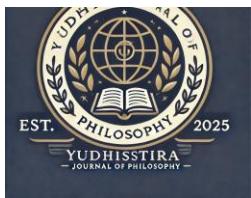
Abstrak

Fenomena ujaran pejabat publik di Indonesia menunjukkan pergeseran signifikan dalam gaya komunikasi politik, dari retorika formal menuju penggunaan bahasa yang lebih provokatif dan kadang kontroversial. Artikel ini menganalisis ujaran pejabat dengan menggunakan pendekatan filsafat bahasa, khususnya teori tindak tutur yang dikembangkan oleh J.L. Austin dan John Searle, serta konsep kekerasan simbolik Pierre Bourdieu. Melalui analisis kualitatif terhadap pernyataan delapan tokoh publik Indonesia pada tahun 2025, penelitian ini mengidentifikasi pola-pola ujaran yang vulgar, menyederhanakan isu kompleks, dan menggunakan humor merendahkan sebagai bagian dari strategi politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran yang dikeluarkan oleh pejabat publik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki dampak sosial-politik yang mendalam, membentuk persepsi publik dan mengubah batas etika komunikasi politik. Fenomena ini mempengaruhi wacana publik, di mana bahasa yang kasar atau tidak sopan menjadi lebih diterima, sekaligus mengaburkan norma komunikasi yang seharusnya menjaga kualitas deliberasi publik. Penelitian ini mempertegas pentingnya literasi wacana politik dalam masyarakat dan mendorong perlunya pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan bahasa oleh pejabat publik untuk menjaga integritas demokrasi dan etika komunikasi dalam politik.

Kata Kunci: Filsafat Bahasa, Retorika Politik, Tindak Tutur, Kekerasan Simbolik, Wacana Publik.

I. PENDAHULUAN

Bahasa yang digunakan oleh pejabat publik lebih dari sekadar sarana komunikasi biasa; bahasa ini juga berfungsi sebagai alat pembentuk realitas sosial. Ujaran yang keluar dari pejabat publik tidak hanya mencerminkan pandangan atau pemikiran pribadi mereka, tetapi juga berpotensi membentuk opini publik dan memengaruhi norma sosial. Ketika bahasa digunakan secara sembarangan—melalui pilihan kata yang vulgar, simplifikasi berlebihan, atau humor yang merendahkan—hal ini menimbulkan implikasi filosofis yang mendalam. Fenomena ini semakin relevan ketika dilihat dalam konteks politik Indonesia yang dinamis, terutama pada tahun 2025, ketika komunikasi politik pejabat semakin dipengaruhi oleh era digital dan penggunaan media sosial yang massif (Noor & Dartim, 2021). Dalam konteks ini, penggunaan bahasa yang tidak bijaksana berpotensi merusak norma kesopanan yang sudah dibangun dalam masyarakat (Foucault, 1980; Austin, 1962). Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki dampak sosial dari ujaran pejabat publik dalam wacana politik.



Filsafat bahasa, khususnya teori tindak tutur yang dikembangkan oleh J.L. Austin dan John Searle, memberikan perspektif penting dalam menganalisis fenomena ini. Menurut teori tindak tutur, setiap ujaran tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk melakukan tindakan yang memengaruhi persepsi dan perilaku audiens (Searle, 1979). Konsep ini menggarisbawahi bahwa bahasa lebih dari sekadar sarana untuk menyampaikan maksud, tetapi juga berfungsi untuk melakukan perubahan sosial melalui tindakan yang disampaikan. Ketika pejabat publik menggunakan bahasa yang mengandung unsur provokasi atau kesederhanaan yang berlebihan, mereka secara tidak langsung membentuk opini masyarakat dan standar komunikasi publik yang diterima. Penelitian oleh Jones dan Davies (2022) menunjukkan bahwa ujaran pejabat, terutama dalam wacana politik, berperan signifikan dalam membentuk etika komunikasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dimensi filosofi dari ujaran-ujaran ini, bukan hanya sebagai informasi semata, tetapi juga sebagai alat pembentukan realitas sosial (Mahbubi, 2024b).

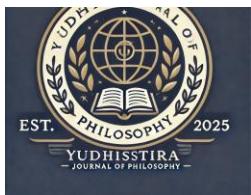
Di Indonesia, fenomena ujaran pejabat publik semakin menarik perhatian, terutama karena komunikasi politik semakin dipengaruhi oleh media sosial. Ujaran yang dikeluarkan oleh pejabat kini tidak hanya terbatas pada pidato formal atau komunikasi tatap muka, tetapi meluas melalui platform daring yang mempercepat penyebaran pesan dan memperluas jangkauan audiens secara instan (Bourdieu, 1991). Pemilihan kata dalam setiap komunikasi, baik melalui televisi, media cetak, atau media sosial, memiliki dampak besar dalam membentuk opini masyarakat dan menciptakan wacana politik yang lebih besar (Mahbubi, 2024a). Penggunaan media sosial memungkinkan pesan-pesan yang diucapkan oleh pejabat untuk langsung diterima oleh audiens tanpa filter, namun di sisi lain ini juga meningkatkan potensi penyebaran ujaran yang tidak etis. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Sunarto (2021), yang menyatakan bahwa algoritma media sosial cenderung memperkuat penyebaran konten kontroversial yang dapat memperburuk polarisasi wacana publik. Dalam hal ini, ujaran yang bersifat provokatif atau kasar sering kali mendapatkan perhatian lebih banyak, meskipun tidak selalu mencerminkan kualitas informasi yang baik.

Konsep bahasa sebagai alat dominasi simbolik yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu dalam teorinya mengenai kekuasaan sangat relevan dalam memahami

bagaimana ujaran pejabat publik dapat berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan memperkuat hierarki sosial. Bourdieu (1991) menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya ditegakkan melalui dominasi fisik, tetapi juga melalui mekanisme simbolik, di mana bahasa memegang peran penting. Melalui ujaran yang keluar dari pejabat publik, berbagai struktur sosial dan politik dapat dikuatkan atau bahkan dibentuk kembali (Mahbubi, 2025a; Nasution dkk., 2022). Ketika pejabat menggunakan bahasa yang mengandung unsur vulgaritas atau kesederhanaan berlebihan, mereka memperkenalkan norma baru yang lebih permisif terhadap jenis komunikasi tersebut. Fenomena ini menjadi lebih jelas ketika komunikasi politik semakin terfokus pada pencitraan pribadi, dan pejabat mulai menggunakan bahasa yang lebih santai dan informal untuk membangun kedekatan dengan rakyat. Namun, penggunaan bahasa seperti ini sering kali mengabaikan etika komunikasi yang seharusnya lebih mempertimbangkan kesantunan dan kepentingan publik (Muchtar, 2021). Dengan demikian, ujaran pejabat publik dapat menjadi mekanisme yang memperkuat struktur kekuasaan tanpa disadari oleh masyarakat.

Selain itu, fenomena ujaran pejabat publik yang sembarangan juga menciptakan masalah epistemologis yang mendalam. Foucault (1980) dalam kajiannya mengenai "regimes of truth" menjelaskan bahwa setiap masyarakat membentuk sistem kebenaran yang ditentukan oleh kekuasaan. Dalam konteks politik, kebenaran ini tidak lagi diukur dengan bukti atau logika, tetapi berdasarkan otoritas dan posisi yang dimiliki oleh pejabat publik. Fenomena ini menjadi sangat relevan dalam era digital, di mana ujaran pejabat sering kali diterima begitu saja tanpa melalui proses analisis yang mendalam oleh audiens. Masyarakat yang terus terpapar pada ujaran pejabat yang tidak sesuai dengan norma berbahasa akan cenderung menerima klaim-klaim tersebut sebagai kebenaran, meskipun sering kali klaim tersebut tidak didukung oleh data yang valid atau fakta yang kuat. Seiring berjalannya waktu, standar etika berbahasa dalam politik semakin tergerus, sehingga masyarakat mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan antara komunikasi yang sah dan yang tidak pantas (Putri & Anwar, 2022).

Di Indonesia, penggunaan media sosial oleh pejabat publik semakin mendorong terbentuknya persona digital yang berfokus pada pencitraan diri, sering kali menggunakan ujaran yang provokatif dan kontroversial untuk menarik perhatian. Pendekatan ini memang efektif dalam menarik audiens, tetapi berpotensi menimbulkan bias kognitif di masyarakat. Publik sering kali lebih mudah menerima pernyataan yang



sesuai dengan preferensi atau pandangan mereka, tanpa mempertimbangkan apakah pernyataan tersebut benar atau tidak. Fenomena ini memunculkan apa yang disebut sebagai "banal authoritarianism," di mana bahasa kasar atau provokatif menjadi bagian dari budaya komunikasi yang diterima dalam wacana politik (Yilmaz & Morieson, 2023). Hal ini mengarah pada pengikisan batas-batas etika dalam komunikasi politik, di mana pejabat yang menggunakan bahasa kasar atau kontroversial justru dianggap lebih dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap dampak bahasa dalam komunikasi politik ini (Kohlberg, 1981; Mahbubi, 2016).

Dalam penelitian ini, saya mengusulkan untuk menggabungkan teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Austin dan Searle dengan konsep kekerasan simbolik Bourdieu untuk menganalisis ujaran pejabat publik Indonesia pada tahun 2025. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk tidak hanya menganalisis makna literal dari ujaran-ujaran tersebut, tetapi juga untuk menggali fungsi sosial dan politik yang tersembunyi di baliknya. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas kajian filsafat bahasa di Indonesia dengan menyelidiki bagaimana bahasa digunakan oleh pejabat untuk membentuk persepsi publik, mengukuhkan kekuasaan, dan mengubah standar etika komunikasi dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembenahan etika komunikasi pejabat publik, sehingga kualitas wacana politik dapat terjaga dengan lebih baik dan mendorong pembentukan ruang publik yang sehat dan konstruktif (Rahman & Sari, 2023).

II. METODE

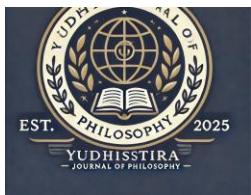
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) yang dipadukan dengan perspektif filsafat bahasa. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk membongkar hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam ujaran publik (Fairclough, 1995; van Dijk, 2008). Dalam konteks penelitian ini, CDA memungkinkan peneliti untuk mengkaji lebih dalam tidak hanya struktur linguistik dari pernyataan pejabat publik, tetapi juga konteks sosial-politik yang melatarinya. Dengan menggunakan teori tindak tutur dari Austin dan Searle, penelitian ini akan memeriksa dimensi lokusi (apa yang diucapkan), ilokusi (maksud yang ingin dicapai), dan perlokusi (dampak pada pendengar) dari ujaran pejabat publik, yang menjadi bagian dari wacana politik di Indonesia (Mahbubi, 2025b). Pendekatan ini memberikan wawasan tentang bagaimana bahasa bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi untuk

mencapai tujuan tertentu dalam ruang politik (Searle, 1979). Selain itu, kerangka kekerasan simbolik yang dikembangkan oleh Bourdieu digunakan untuk melihat bagaimana ujaran pejabat publik dapat mengukuhkan atau menantang struktur kekuasaan melalui mekanisme bahasa (Bourdieu, 1991).

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari delapan tokoh publik Indonesia yang pada tahun 2025 tercatat membuat pernyataan atau tindakan kontroversial, yakni Budi Gunadi Sadikin, Gus Miftah, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Hasan Nasbi, Bahlil Lahadalia, Prabowo Subianto, dan Muhammad Syafi'i. Data dikumpulkan melalui penelusuran media daring, transkrip wawancara, unggahan di platform media sosial, dan arsip pemberitaan. Pemilihan subjek didasarkan pada kriteria keterpaparan publik yang tinggi dan dampak signifikan terhadap wacana politik nasional, sehingga setiap kasus memiliki relevansi empiris yang kuat dalam kajian filsafat bahasa. Hal ini penting, mengingat pengaruh yang dimiliki oleh para tokoh ini dalam membentuk persepsi masyarakat melalui ujaran yang mereka sampaikan di ruang publik (Muchtar, 2021). Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana ujaran pejabat publik memengaruhi wacana politik dan membentuk realitas sosial.

Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, di mana hanya pernyataan yang memenuhi indikator kontroversi dan memiliki rekam jejak dokumentasi digital yang jelas yang dimasukkan dalam analisis (Miles et al., 2014). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki relevansi dan kualitas yang tinggi. Selanjutnya, data dianalisis dalam tiga tahap. Pertama, analisis linguistik dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk ujaran, termasuk pilihan leksikal, struktur kalimat, dan penggunaan metafora atau humor yang dapat memengaruhi persepsi publik. Kedua, analisis tindak turur digunakan untuk memetakan maksud dan dampak dari ujaran tersebut berdasarkan kerangka teori tindak turur Austin dan Searle. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana ujaran pejabat tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan yang dapat memengaruhi perilaku dan pemikiran audiens (Austin, 1962). Ketiga, analisis kekerasan simbolik digunakan untuk memahami bagaimana ujaran tersebut mengukuhkan atau menantang struktur kekuasaan dalam ruang publik, serta bagaimana bahasa digunakan sebagai alat dominasi simbolik (Bourdieu, 1991; van Dijk, 2015). Pendekatan ini sangat berguna untuk memahami bagaimana wacana politik dibentuk melalui bahasa dan bagaimana kekuasaan dipertahankan dan diproduksi dalam masyarakat.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Data dari media daring dibandingkan dengan dokumentasi video asli dan transkrip resmi guna menghindari distorsi interpretatif yang dapat terjadi selama proses pengumpulan data (Mahbubi, 2025b). Dengan membandingkan berbagai sumber, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai bagaimana ujaran pejabat dipersepsi oleh masyarakat. Selain itu, hasil analisis awal didiskusikan dengan dua pakar komunikasi politik dan satu akademisi filsafat bahasa untuk memverifikasi konsistensi temuan. Diskusi ini dilakukan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh tidak hanya valid tetapi juga relevan dengan teori-teori yang ada dalam kajian filsafat bahasa dan komunikasi politik. Proses coding dan interpretasi data dilakukan secara manual dengan bantuan perangkat lunak



NVivo 14, yang mempermudah pengelompokan tema dan meminimalkan bias peneliti dalam menganalisis data (Richards, 2020).

Etika penelitian dijaga dengan memastikan bahwa seluruh data yang digunakan bersumber dari ruang publik dan tidak melanggar privasi individu. Nama tokoh publik tetap dicantumkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas akademik, mengingat pernyataan yang dianalisis sudah menjadi bagian dari arsip wacana publik (Mahbubi, 2025b). Penelitian ini memposisikan analisis secara kritis tetapi tetap mengedepankan objektivitas, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan berkontribusi pada pengembangan kajian filsafat bahasa di Indonesia. Dengan pendekatan yang kritis ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana bahasa, sebagai alat komunikasi dan dominasi, berperan dalam pembentukan wacana politik dan realitas sosial di Indonesia, terutama dalam konteks penggunaan bahasa oleh pejabat publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap etika berbahasa dan kualitas wacana politik di negara ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa yang digunakan oleh pejabat publik Indonesia pada tahun 2025 mencerminkan perubahan yang signifikan dalam retorika politik, di mana ujaran-ujaran yang sebelumnya dianggap tidak etis mulai diterima sebagai bagian dari komunikasi politik yang sah. Fenomena ini menggambarkan pergeseran yang terjadi dalam cara pejabat berkomunikasi dengan publik, khususnya dalam menggunakan bahasa kasar, vulgar, atau humor yang merendahkan. Ujaran yang diucapkan oleh pejabat publik bukan hanya menjadi sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menegaskan kekuasaan dan dominasi politik. Pola-pola ujaran seperti ini, yang seringkali digunakan dalam pidato politik dan di ruang publik, memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan membentuk wacana publik dalam cara yang lebih halus dan subtil.

Salah satu pola yang paling mencolok dalam komunikasi pejabat publik adalah penggunaan vulgaritas metaforis yang mengandung kata-kata kasar atau menghina, seperti istilah “ndasmu” atau “goblok.” Ujaran-ujaran semacam ini seringkali diucapkan dalam forum resmi dan diikuti dengan tawa audiens, yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut tidak hanya dianggap sebagai candaan tetapi juga memiliki peran dalam membentuk relasi sosial antara pejabat dan publik. Dalam kerangka filsafat bahasa, seperti yang dijelaskan oleh Austin (1962), ujaran-ujaran tersebut tidak hanya menyampaikan informasi atau maksud, tetapi juga melakukan tindakan yang dapat memengaruhi audiens. **Illocutionary acts** yang terkandung dalam ujaran ini berfungsi untuk memperkuat posisi otoritas pejabat publik di mata audiens, yang akhirnya menegaskan dominasi mereka dalam struktur kekuasaan. Meskipun pada awalnya, penggunaan bahasa kasar ini mungkin dianggap tidak sesuai dengan norma-norma komunikasi politik yang formal, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa retorika semacam ini justru memiliki kemampuan untuk meningkatkan kedekatan emosional dengan pemilih tertentu, sekaligus melanggengkan narasi kekuasaan yang tak terbantahkan (Ramadhani, 2023). Dengan kata lain, ujaran vulgar semacam ini tidak hanya berfungsi

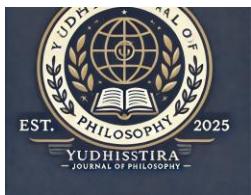
sebagai strategi komunikasi politik, tetapi juga sebagai alat untuk mengukuhkan hegemoni politik yang ada dalam masyarakat.

Menurut Bourdieu (1991), konsep **kekerasan simbolik** sangat relevan dalam konteks ini. Ujaran-ujaran kasar yang diterima dalam forum formal ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat struktur sosial yang sudah ada tanpa memerlukan paksaan fisik. Dengan kata lain, bahasa digunakan sebagai alat untuk mereproduksi kekuasaan yang secara diam-diam mengatur masyarakat, bahkan ketika tampak tidak ada paksaan secara langsung. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana pejabat publik menggunakan bahasa untuk memperkokoh posisi mereka dalam hierarki sosial-politik, yang pada gilirannya membentuk dan mengarahkan wacana politik publik. Ujaran kasar yang diulang-ulang dalam konteks resmi, sering kali tanpa adanya penolakan dari publik, akhirnya menjadi bagian dari norma komunikasi yang diterima. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh bahasa dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pejabat publik dan wacana politik yang mereka sampaikan.

Selain vulgaritas metaforis, humor merendahkan juga menjadi salah satu pola yang dominan dalam ujaran pejabat publik. Lelucon yang menghina kelompok tertentu—baik itu rakyat kecil, wartawan, atau kelompok lain—seringkali digunakan untuk memperkuat citra pejabat di mata publik dan menciptakan citra kedekatan dengan rakyat. Namun, meskipun humor ini sering dikemas dalam bentuk candaan, dalam kajian linguistik ini dikenal sebagai **face-threatening act** (Brown & Levinson, 1987). Humor yang merendahkan seperti ini tidak hanya bertujuan untuk membuat audiens tertawa, tetapi juga berfungsi untuk mempertahankan otoritas pejabat dengan cara merendahkan pihak lain. Dalam perspektif filsafat bahasa, hal ini merupakan bentuk **kekerasan simbolik yang tersembunyi**, di mana makna agresif yang terkandung dalam humor tersebut diterima tanpa disadari oleh publik (Sartini & Adrian, 2023). Humor semacam ini sering kali sulit dikritik karena ia disajikan dalam kemasan yang lebih ringan, namun tetap memiliki dampak besar dalam mengubah persepsi publik terhadap kelompok yang dihina.

Studi tentang humor dalam pidato politik juga menunjukkan bahwa humor ofensif memiliki daya sebar yang tinggi dan mampu mengurangi kemungkinan kritik terhadap pejabat yang menggunakannya (Wijayanti & Purnomo, 2024). Hal ini disebabkan oleh cara orang-orang cenderung memaklumi atau menerima humor sebagai bagian dari interaksi sosial yang tidak perlu dipertanyakan. Meskipun demikian, humor ofensif ini dapat berfungsi untuk membungkam kritik terhadap tindakan atau kebijakan pejabat yang bersangkutan. Fenomena ini mengarah pada normalisasi kekerasan simbolik, di mana humor merendahkan dan bahasa kasar menjadi bagian dari wacana yang tidak lagi dipertanyakan oleh masyarakat. Masyarakat menjadi terbiasa dengan bahasa kasar dan merendahkan dalam komunikasi politik, dan ini semakin memperkuat budaya politik yang permisif terhadap kekerasan verbal.

Selain humor merendahkan, simplifikasi berlebihan dalam ujaran pejabat publik juga menjadi fenomena yang semakin umum. Misalnya, pernyataan sederhana seperti “jeans ukuran 34 ke atas pasti obesitas” merupakan contoh dari **reductionism linguistik**, di mana isu kompleks yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat atau pendidikan disederhanakan menjadi klaim yang terlalu simpel dan tidak mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi yang lebih luas. Simplifikasi ini berfungsi untuk menciptakan pemahaman yang mudah diterima oleh publik tanpa memperhitungkan faktor-faktor yang lebih kompleks yang



membentuk suatu masalah. Penyederhanaan yang ekstrem ini sering kali memperkuat stereotip kelompok tertentu, sehingga memunculkan polarisasi di masyarakat (Susanto et al., 2024). Dalam kerangka filsafat bahasa, penyederhanaan ini merupakan bentuk simbolisme kekuasaan, di mana pejabat publik mendiktekan batasan-batasan wacana yang layak dan mengurangi ruang untuk kritik atau interpretasi yang lebih kritis dari publik. Simplifikasi semacam ini juga mereduksi perdebatan politik yang seharusnya lebih mendalam menjadi sesuatu yang mudah dicerna, tetapi kehilangan makna yang lebih substansial.

Ketiga pola yang telah diidentifikasi—vulgaritas metaforis, humor merendahkan, dan simplifikasi berlebihan—berfungsi sebagai instrumen retoris yang lebih dari sekadar komunikasi politik. Ujaran-ujaran ini beroperasi sebagai alat untuk menegaskan kekuasaan dan dominasi pejabat publik dalam wacana politik. Dalam teori tindak turut Austin (1962) dan Searle (1969), ujaran-ujaran ini tidak hanya mencerminkan kenyataan sosial, tetapi juga mengubah realitas sosial melalui tindakan yang dilakukan oleh pembicara. Dengan kata lain, ujaran yang kasar dan vulgar tidak hanya memperlihatkan keadaan politik, tetapi juga membentuk dan mengarahkan wacana publik ke arah yang diinginkan oleh pejabat yang mengucapkannya. Fenomena ini menggambarkan bagaimana bahasa, sebagai alat komunikasi, tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk memproduksi makna dan membentuk realitas ideologis yang sesuai dengan kepentingan politik yang ada (Danaditya et al., 2022).

Fenomena ini juga memperlihatkan ketegangan antara retorika politik dan etika komunikasi. Dalam filsafat wacana Habermas, komunikasi yang adil dan demokratis harusnya melibatkan kejujuran, keterbukaan, dan penerimaan kritik. Namun, dengan semakin dominannya bahasa kasar dan merendahkan dalam wacana publik, ruang untuk kritik menjadi sangat terbatas. Ujaran-ujaran yang kasar dan simplistik ini berfungsi untuk mengalihkan perhatian publik dari kritik yang lebih mendalam, sehingga menciptakan atmosfer di mana kritik dianggap sebagai sesuatu yang tidak elegan atau bahkan tabu (Yulianti, 2025). Hal ini menunjukkan bagaimana degenerasi wacana publik dapat terjadi ketika humor dan penyederhanaan menggantikan argumentasi yang lebih rasional dan kritis dalam diskursus politik.

Normalisasi kekerasan simbolik melalui bahasa yang kasar ini dapat memperburuk kualitas demokrasi dan kualitas deliberasi publik. Ketika masyarakat mulai menerima ujaran-ujaran yang merendahkan sebagai bagian dari politik sehari-hari, mereka semakin kehilangan sensitivitas terhadap martabat manusia dan terhadap nilai-nilai dasar dalam berkomunikasi. Hal ini semakin diperburuk oleh peran media sosial, yang mempercepat penyebaran ujaran-ujaran kontroversial dan memperkuat efek perlakuan, yaitu dampak yang diterima oleh audiens setelah mendengar ujaran tersebut (Murphy, 2022). Dengan demikian, pergeseran dalam wacana politik ini tidak hanya memengaruhi cara pejabat berbicara, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons wacana tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring waktu, ujaran yang kasar dan merendahkan ini semakin diterima sebagai bagian dari norma komunikasi publik yang sah, meskipun sebenarnya ia merusak kualitas wacana

politik. Proses ini mengarah pada terjadinya **linguistic hegemony**, yaitu dominasi simbolik yang dipertahankan melalui kebiasaan komunikasi yang tidak disadari oleh masyarakat (Gramsci, 1971). Oleh karena itu, perubahan kebijakan dalam ranah komunikasi politik tidak cukup hanya dilakukan di tingkat kebijakan formal, tetapi juga memerlukan perubahan dalam praktik linguistik di tingkat elit politik. Artinya, perlawanan terhadap kekerasan verbal yang terjadi dalam politik harus dimulai dengan dekonstruksi terhadap cara berbicara yang telah lama dilegitimasi dalam wacana politik Indonesia.

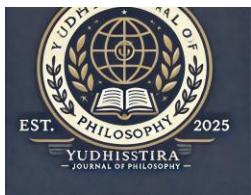
IV. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan oleh pejabat publik Indonesia pada tahun 2025 berperan jauh lebih besar daripada sekadar sarana komunikasi; bahasa tersebut adalah alat yang membentuk realitas sosial dan politik di masyarakat. Ujaran pejabat publik yang vulgar, kasar, atau merendahkan seringkali digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat dominasi politik mereka, memperpanjang kekuasaan mereka, dan bahkan menormalisasi kekerasan simbolik dalam wacana publik. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada pilihan kata yang vulgar, tetapi juga mencakup humor merendahkan dan simplifikasi berlebihan yang semakin diterima dalam komunikasi politik.

Melalui pendekatan filsafat bahasa, khususnya teori tindak tutur yang dikembangkan oleh J.L. Austin dan John Searle, serta konsep kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu, penelitian ini mengungkapkan bagaimana ujaran pejabat publik tidak hanya bertindak untuk menyampaikan informasi tetapi juga sebagai **illocutionary act** yang bertujuan mengubah persepsi audiens dan memperkuat struktur kekuasaan. Ujaran yang vulgar dan humor yang merendahkan, meskipun sering dibungkus dengan alasan kebebasan berpendapat atau humor, sebenarnya berfungsi sebagai alat dominasi yang memperkokoh hierarki sosial dan mengurangi ruang untuk kritik yang konstruktif. Hal ini menjadi semakin jelas ketika bahasa digunakan untuk menyederhanakan isu-isu kompleks, mengurangi kompleksitas diskursus publik, dan memperkuat narasi yang lebih sederhana dan lebih mudah diterima oleh audiens tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi yang mendalam.

Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini adalah memperlihatkan bagaimana fenomena retorika kekuasaan ini, meskipun mungkin tampak sebagai insiden terisolasi atau ekspresi spontan, sesungguhnya merupakan gejala yang berulang dalam komunikasi pejabat publik. Proses ini memperlihatkan bagaimana bahasa vulgar atau humor yang merendahkan secara halus menormalkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan norma etika dalam ruang publik. Dominasi gaya komunikasi yang kasar ini berisiko mengikis batasan etis dalam berkomunikasi, sehingga menciptakan atmosfer di mana kritik dianggap tabu dan tidak memiliki ruang legitimasi, sebagaimana ditemukan dalam analisis diskursus kontemporer (Yulianti, 2025; Fairclough, 1995).

Normalisasi kekerasan simbolik melalui bahasa tidak hanya memengaruhi pejabat yang menggunakan, tetapi juga masyarakat yang terpapar pada ujaran tersebut. Seiring waktu, masyarakat mulai menerima bahasa kasar dan merendahkan sebagai bagian dari kehidupan politik sehari-hari, yang pada gilirannya memperkuat polarisasi sosial dan memperburuk kualitas diskursus publik. Ini menciptakan lingkaran umpan balik di mana wacana politik



semakin dipenuhi dengan ujaran yang kasar, yang memperburuk pemahaman masyarakat terhadap isu-isu penting dan mengurangi kualitas deliberasi publik (Mole, 2020).

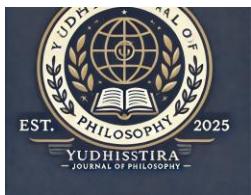
Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bagaimana retorika politik yang tidak mematuhi norma etika berbahasa dapat menurunkan kualitas komunikasi politik di Indonesia dan merusak demokrasi. Penyalahgunaan bahasa dalam politik, baik melalui vulgaritas, humor yang merendahkan, maupun penyederhanaan berlebihan, memperburuk kualitas wacana publik dan memperkuat kekuasaan tanpa paksaan fisik. Oleh karena itu, literasi wacana politik yang kritis menjadi semakin mendesak agar masyarakat dapat membedakan antara komunikasi yang sah dan yang merusak kualitas wacana demokratis. Dekonstruksi terhadap penggunaan bahasa kasar dalam politik harus dimulai dengan kesadaran kritis terhadap praktik berbahasa pejabat publik, serta perubahan dalam cara berbicara yang telah lama dilegitimasi sebagai norma dalam wacana politik Indonesia.

Dengan demikian, perubahan kebijakan dalam ranah komunikasi politik tidak cukup hanya dilakukan di tingkat kebijakan formal, tetapi juga harus melibatkan perubahan dalam praktik linguistik di tingkat elit politik. Perlawan terhadap kekerasan verbal dalam politik harus dimulai dengan dekonstruksi terhadap cara bicara yang telah lama diterima sebagai bagian dari praktik politik yang sah. Jika hal ini tidak segera dilakukan, budaya wacana politik yang semakin permisif terhadap kekerasan verbal ini akan terus menggerus kualitas demokrasi Indonesia dan memperburuk kualitas komunikasi politik di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, A. (2023). Kekerasan Simbolik dalam Wacana Keagamaan di Indonesia. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama. <https://doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.12628>
- Amrihani, H. A. (2025). Unveiling Symbolic Violence in the Daily Practices of Journalists in Jakarta. Profetik: Jurnal Komunikasi. <https://doi.org/10.14421/pjk.v18i1.3104>
- Austin, J. L. (1962). How to do things with words. Harvard University Press.
- Bakir, V., & McStay, A. (2021). Fake news and emotional engagement on social media. *Journal of Media Ethics*, 36(3), 167–182. <https://doi.org/10.1080/23736992.2021.1914908>
- Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Harvard University Press.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). The mediated construction of reality. Polity Press.
- Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Polity Press.
- Culpeper, J. (2011). Impoliteness: Using language to cause offence. Cambridge University Press.
- Danaditya, A., Ng, L. H. X., & Carley, K. M. (2022). From Curious Hashtags to Polarized Effect: Profiling Coordinated Actions in Indonesian Twitter Discourse. arXiv.
- Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. Longman.
- Fairclough, N. (2018). Critical discourse analysis: The critical study of language (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315834368>
- Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977. Pantheon Books.

- Green, M. (2017). *Speech acts*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315688039>
- Haryanto, B., & Widodo, S. (2024). Political communication strategies in the digital era. *Journal of Media and Politics*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.1080/25741136.2024.1189932>
- Holmes, J., & Schnurr, S. (2020). Impoliteness and leadership. *Journal of Pragmatics*, 170, 162–175. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2020.08.004>
- Ives, P. (2020). *Language and hegemony in Gramsci* (2nd ed.). Haymarket Books.
- Jones, T., & Davies, R. (2022). Speech acts and political discourse in the digital age. *Discourse & Society*, 33(4), 452–469. <https://doi.org/10.1177/09579265221095783>
- Joseph, J. E. (2021). *Language, politics, and society*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108653323>
- Kiesling, S. F. (2018). Style, stance, and identity in sociolinguistics. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315532806>
- Langton, R. (1993). Speech acts and unspeakable acts. *Philosophy & Public Affairs*, 22(4), 293–330.
- Lim, M., & Ong, J. C. (2021). Political communication in Southeast Asia. *Asian Journal of Communication*, 31(3), 199–214. <https://doi.org/10.1080/01292986.2021.1911525>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Mole, R. C. M. (2020). Discursive governance and social discipline. *Government and Opposition*, 55(1), 1–25. <https://doi.org/10.1017/gov.2018.14>
- Muchtar, F. (2021). Political humor and public perception in Indonesian online media. *Asian Journal of Communication*, 31(5), 420–435. <https://doi.org/10.1080/01292986.2021.1946752>
- Murphy, J. (2022). Public speech norms and political civility. *Political Studies*, 70(2), 365–382. <https://doi.org/10.1177/0032321720915749>
- Pew Research Center. (2024). Most Indonesians Agree Free Speech Is Important, But Social Harmony Trumps It. Pew Research.
- Putri, A., & Anwar, M. (2022). Truth regimes in the era of social media politics. *Indonesian Journal of Social Studies*, 8(2), 99–113. <https://doi.org/10.15294/ijss.v8i2.36510>
- Rahayu, N., & Santoso, A. (2023). Controversial statements and political branding in Indonesia. *Komunikasi Politik Indonesia*, 5(1), 15–28.
- Rahman, T., & Sari, D. (2023). Revisiting symbolic violence in Southeast Asian political speeches. *Journal of Language and Politics*, 22(3), 301–320. <https://doi.org/10.1075/jlp.22015.rah>
- Ramadhani, M. (2023). Vulgar Political Speech and Voter Engagement: A Sociolinguistic Study in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Politik*.
- Richards, L. (2020). *Handling qualitative data: A practical guide* (4th ed.). SAGE.
- Sartini, N. W., & Adrian, D. (2023). Symbolic violence and discrimination in a social media comment section. *Cogent Arts & Humanities*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2270287>
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge University Press.



Yudhistira: Vol. 10, No. 1 April 2022 (Lihat di home Jurnal)

Bamala Institute, Kraksaan Probolinggo Jawa Timur

<https://ejournal.bamala.org/index.php/yudhistira/home>

Halaman: xx-xx

- Searle, J. R. (1979). Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts. Cambridge University Press.
- Smith, J. (2020). Philosophy of language and political discourse. Routledge.
- Sunarto, A. (2021). Algorithmic amplification of controversial speech in social media. *New Media & Society*, 23(9), 2564–2582. <https://doi.org/10.1177/1461444820934034>
- Susanto, L., Wijanarko, M. I., Pratama, P. A., et al. (2024). IndoToxic2024: A Demographically-Enriched Dataset of Hate Speech and Toxicity Types for Indonesian Language. arXiv.
- van Dijk, T. A. (2008). Discourse and power. Palgrave Macmillan.
- van Dijk, T. A. (2015). Critical discourse analysis. In D. Tannen, H. E. Hamilton, & D. Schiffrin (Eds.), *The handbook of discourse analysis* (pp. 466–485). Wiley.
- van Dijk, T. A. (2018). Discourse and power. Palgrave Macmillan.
- Yilmaz, I., & Morieson, N. (2023). Banal authoritarianism and populism. *Political Studies Review*, 21(1), 23–35. <https://doi.org/10.1177/14789299211073248>
- Wijaya, D. (2024). Digital persona and political rhetoric in Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 55(2), 211–229. <https://doi.org/10.1017/S002246342300054X>
- Wittgenstein, L. (1953). Philosophical investigations. Blackwell.
- Yuliana, S. (2023). Symbolic violence in Indonesian political discourse. *Asian Politics & Policy*, 15(4), 789–804. <https://doi.org/10.1111/aspp.12663>
- Yulianti, S. (2025). Degradation of Public Discourse: Humor, Crowd, and Authoritarian Speech. *Jurnal Ilmiah Politik dan Media*.
- Zhang, W., & Liu, S. (2021). Political speech style and social media discourse in Asia. *Asian Journal of Communication*, 31(6), 456–472. <https://doi.org/10.1080/01292986.2021.1981750>